

CLIMATE CHANGE MEDIA MONITORING

OKTOBER 2021



#CLIMATELEADERSHIP

KLHK: Pemerintah Daerah Berperan Tangani Bencana Perubahan Iklim

Penanganan perubahan iklim adalah upaya kolektif di mana pemerintah daerah memiliki peran penting di dalamnya. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim bukan hanya melalui proses negosiasi antara negara-negara maju dan berkembang di tingkat internasional, namun perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan bahkan hingga tingkat tapak. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam mitigasi perubahan iklim dapat mengambil peran, memperkuat komitmen dan berkontribusi dalam berbagai upaya yang tengah dilakukan. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di lima sektor yang ditargetkan, yaitu energi, limbah, pertanian, kehutanan serta industri dan penggunaan produk sesuai dengan dokumen Nationally Determined Contributions (NDC).

Sumber:

<https://www.kompas.tv/article/222046/klhk-pemerintah-daerah-berperan-tangani-bencana-perubahan-iklim>

Hadapi Perubahan Iklim, Ini yang Dilakukan Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub No 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD). Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya menghadapi perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian target pengurangan emisi GRK. RPRKD juga merupakan aksi adaptasi perubahan iklim perdana yang diatur dalam sebuah produk hukum. RPRKD memuat aksi perubahan iklim yang mengintegrasikan aksi mitigasi dan adaptasi di DKI Jakarta. RPRKD adalah bentuk kontribusi aktif Jakarta dalam mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia. Jakarta melakukan inovasi menyeluruh dengan memastikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diberlakukan secara seimbang.

Sumber:

<https://www.medcom.id/nasional/metro/VNnomJXb-hadapi-perubahan-iklim-ini-yang-dilakukan-anies-baswedan>



#CLIMATEEMERGENCY

PBB Ingatkan Tantangan Perubahan Iklim dan Kelangkaan Air bagi Seluruh Dunia

Pemanasan suhu Bumi diperkirakan akan memengaruhi pasokan air di dunia di masa mendatang. Namun, akibat yang ditimbulkan hal tersebut tidak akan merata. Ratusan juta orang akan mengalami kelangkaan air yang baru terjadi atau yang bertambah buruk pada 2100. Bahkan, pemanasan suhu sebesar dua derajat Celcius disebut akan menyulitkan 485 juta orang. Jika kenaikan suhu Bumi sebesar lima derajat, maka akan ada 785 juta orang yang terpapar kondisi kekurangan air, 605 juta di antaranya berada di Asia, Afrika dan Amerika Latin. IPCC memperkirakan bahwa akan adanya peningkatan permasalahan yang berkaitan dengan air di dunia. Di Indonesia, belum ada riset mendalam dengan fokus pada perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketersediaan air. Ketersediaan air secara nasional berpotensi akan berkurang dan mengakibatkan terjadinya krisis air.

Sumber:

<https://www.suara.com/news/2021/10/07/173005/pbb-ingatkan-tantangan-perubahan-iklim-dan-kelangkaan-air-bagi-seluruh-dunia>

Angka Kelaparan Dunia Meningkat Tajam, Pandemi-Perubahan Iklim Jadi Pemicunya

Laporan Indeks Kelaparan Global terbaru mengungkapkan, sekitar 50 negara di dunia menghadapi tingkat kelaparan serius. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tahun 2021 telah mengkorelasikan pemanasan global - khususnya peristiwa cuaca yang lebih sering dan intens seperti badai, banjir, dan kekeringan - dengan meningkatnya kerawanan pangan. Laporan FAO juga menyebutkan, kerusakan rantai pasokan dan pembatasan untuk membendung penyebaran COVID-19 telah menyebabkan turunnya ketahanan pangan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan. Sementara itu, sebuah penelitian terpisah dari jurnal Nature menunjukkan, dibandingkan masa pra-pandemi, sekitar 2,6 juta anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah akan terancam menderita stunting antara tahun 2020 dan 2022.

Sumber:

<https://www.dw.com/id/angka-kelaparan-dunia-meningkat-tajam-pandemi-perubahan-iklim-pemicunya/a-59502298>

Bakal Rugi US\$4,7 Triliun Karena Perubahan Iklim, Mampukah Negara di Asia Bertahan?

Kawasan Asia berada di lini terdepan krisis iklim dengan kerugian terbesar yang disebabkan perubahan iklim mencapai US\$ 4,7 triliun dalam PDB menurut analisis terbaru McKinsey. Sementara di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim bisa mencapai Rp 115 triliun pada 2024. Asia memiliki peluang besar untuk memetakan langkah baru selanjutnya dalam mengelola risiko sosial, ekonomi dan iklim. Namun untuk memberdayakan kawasan baru, dibutuhkan ide-ide segar, pendekatan, keberanian, kelincahan (*agility*) dan pola pikir yang strategis.

Sumber:

<https://www.liputan6.com/global/read/4684441/bakal-rugi-us-47-triliun-karena-perubahan-iklim-mampukah-negara-di-asia-bertahan>

Isyarat Perubahan Iklim di Kalimantan Kian Terasa

Dampak perubahan iklim kian terasa di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Kalimantan Barat. Banjir telah melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat pada 2021. Di Kota Pontianak, banjir melanda hampir seluruh wilayah ini pada bulan Agustus. Banjir menggenangi ruas-ruas jalan dan gang-gang di perumahan warga. Hasil simulasi lembaga nonprofit Climate Central tahun 2021 menunjukkan, hampir semua wilayah pesisir Indonesia mempunyai risiko mengalami dampak kenaikan muka air laut, termasuk Pontianak. Perkiraan kerugian ekonomi mencapai Rp 8,44 miliar. Di Malawi, telah adanya upaya untuk membuat kabupaten konservasi. Namun, desakan investasi berbasis hutan dan lahan tidak mampu dibendung dan bencana ekologis tetap terjadi di daerah tersebut.

Sumber:

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/09/22/isyarat-perubahan-iklim-di-kalimantan-kian-terasa>

#CLIMATEFINANCING

Berkomitmen Atasi Climate Change, RUU HPP Atur Pengenaan Pajak Karbon

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (07/10), mengatur berbagai kebijakan perpajakan, salah satunya mengenai pengenaan pajak baru berupa pajak karbon. Pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan menggunakan mekanisme pajak yang berdasarkan pada batas emisi (*cap and tax*). Tarif Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi *cap* yang ditetapkan. Pengenaan pajak ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai target Nationally Determined Contributions (NDC) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Sumber:

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berkomitmen-atasi-climate-change-ruu-hpp-atur-pengenaan-pajak-karbon/>

ADB Kerek Target Pembiayaan Mitigasi Perubahan Iklim Rp 284 T

ADB menaikkan target pembiayaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar US\$20 miliar atau setara Rp 284 triliun dalam satu dekade ke depan. Kebijakan ini dilakukan dengan melihat bahwa kondisi perubahan iklim semakin buruk setiap harinya, serta untuk mencapai ambisi ADB dalam mendanai iklim sebesar US\$100 miliar secara kumulatif hingga 2030. Hingga kini, ADB telah melakukan peninjauan terhadap upaya melawan perubahan iklim di Asia dan menemukan beberapa peminjam tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi iklim yang ada. ADB mengawasi mekanisme transisi energi di Indonesia dan Filipina untuk mengganti pembangkit yang menghasilkan karbon menjadi sumber energi terbarukan.

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211013175936-78-707407/adb-kerek-target-pembiayaan-mitigasi-perubahan-iklim-rp284-t>



#CLIMATEACTION

Suara Anak Muda Tak Cukup Hanya Didengar

Pertemuan Youth4Climate yang merupakan pertemuan 400 anak muda aktivis lingkungan hidup di Milan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk dapat dibahas pada pertemuan COP26 di Glasgow. Rekomendasi tersebut seperti sistem keuangan iklim yang transparan, penambahan pembiayaan iklim untuk negara berkembang, pariwisata berkelanjutan dan bertanggung jawab, penghapusan industri berbahan bakar fosil, serta transisi energi hijau pada tahun 2030. Rekomendasi ini akan didengarkan, namun, berkas rekomendasi tersebut akan dibahas terlebih dahulu di tingkat menteri energi. Saat ini suhu bumi naik 1,06-1,26 derajat Celsius dibandingkan dengan rata-rata suhu pada 1850-1900 sebelum Revolusi Industri. Untuk mencegah kenaikan suhu 1,5 Celsius, emisi harus dikurangi 45 persen dari level emisi tahun 2010. Karena generasi muda yang akan mewarisi bumi, proses perundingan iklim semestinya lebih banyak mendengarkan suara anak muda. Anak muda lebih rentan terhadap perubahan iklim daripada orang dewasa. Berbagai dampak perubahan iklim yang dapat terjadi bagi anak muda dalam jangka panjang, mulai dari tak bisa lanjut sekolah, menikah dini karena alasan ekonomi, hingga kesulitan mencari pekerjaan, lalu terbelit dalam belenggu kemiskinan.

Sumber:

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/04/suara-anak-muda-tak-cukup-hanya-didengar>

Krisis Iklim Tak Tertangani Tanpa Kerja Sama

Ancaman perubahan iklim nyata dirasakan di seluruh dunia. Tidak ada cara lain untuk mengatasi perubahan iklim selain bekerja sama mengurangi emisi hingga tercapai target net zero pada 2050. Butuh kerja sama dari semua pihak, terutama anak muda dalam proses diskusi perumusan kebijakan terkait dengan isu dan perubahan iklim.

Sumber:

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/11/krisis-iklim-tak-tertangani-tanpa-kerja-sama>

